

**PENGARUH JUMLAH PAJAK RESTORAN, JUMLAH PAJAK
HOTEL DAN RETRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

ORCHIDEA VIOLETA

155020101111056

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

Pengaruh Jumlah Pajak Restoran, Jumlah Pajak Hotel dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur.

Yang disusun oleh :

Nama : Orchidea Violeta

NIM : 155020101111056

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **22 Juli 2021** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Eddy Suprpto, SE., ME.

NIP. 195807091986031002

(Dosen Pembimbing)

2. Shofwan, SE., M.Si.

NIP. 197305172003121002

(Dosen Penguji I)

3. Atu Bagus Wiguna, S.E., M.E.

NIP. 2016079101181001

(Dosen Penguji II)

Malang, 12 Agustus 2021

Ketua Program Studi

S-1 Ekonomi Pembangunan

Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.

NIP. 196503111989032001

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

Pengaruh Jumlah Pajak Restoran, Jumlah Pajak Hotel dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur

Yang disusun oleh :

Nama : Orchidea Violeta

NIM : 155020101111056

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi

Prodi : Ekonomi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif.

Malang,

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Ekonomi Pembangunan

Dosen Pembimbing,




Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.

Eddy Suprpto, SE., ME.

NIP. 196503111989032001

NIP. 195807091986031002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Orchidea Violeta**
Tempat, tanggal lahir : **Jombang, 12 September 1997**
NIM : **155020101111056**
Jurusan : **S1 Ilmu Ekonomi**
Konsentrasi : **Ekonomi Sumber Daya**
Alamat : **Jl. Mt Haryono Gg. VIII No.1008, Dinoyo, Kec, Lowokwaru, Kota Malang**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

**Pengaruh Jumlah Pajak Restoran, Jumlah Pajak Hotel dan Retribusi Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur**

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang,

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,



Eddy Suprpto, SE., ME.
NIP. 195807091986031002

Yang membuat pernyataan,



Orchidea Violeta
NIM. 155020101111056

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan,



Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.
NIP . 196503111989032001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Ilmu Pengetahuan	7
1.4.2 Pengambil Kebijakan	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
2.1 Kerangka Teori	8
2.1.1 Penerimaan Daerah	8
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah	9
2.1.3 Pariwisata	11
2.1.4 Jumlah Pajak Restoran	15
2.1.5 Jumlah Pajak Hotel	16
2.1.6 Retribusi	18
2.1.7 Teori Pertumbuhan Ekonomi	22
2.1.8 Teori Pembangunan Daerah	23
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.2.1 Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	31
2.3 Kerangka Pikir	32



2.4	Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN.....		34
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
3.2	Definisi Operasional Variabel	34
3.3	Populasi dan Sampel	36
3.4	Metode Pengumpulan Data	37
3.4.1	Jenis Data	37
3.4.2	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	37
3.5	Metode Analisis Data	38
3.5.1	Analisis Regresi	38
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	38
3.5.3	Uji Normalitas	39
3.5.4	Uji Multikolinearitas	39
3.5.5	Uji Heteroskedastisitas	40
3.6	Uji Hipotesis	40
3.6.1	Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)	40
3.6.2	Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)	41
3.6.2	Koefisien Determinasi (R^2)	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		43
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	43
4.2	Deskripsi Variabel Penelitian	45
4.3	Hasil Penelitian	46
4.3.1	Uji Asumsi Klasik	46
4.3.2	Analisis Regresi Linear Berganda	49
4.3.3	Uji Hipotesis	50
4.4	Intepretasi Hasil Analisis	53
4.4.1	Pengaruh Jumlah Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur	53
4.4.2	Pengaruh Jumlah Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur	54
4.4.3	Pengaruh Jumlah Pajak Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur	54
BAB V KEISMPULAN DAN SARAN		56
5.1	Kesimpulan	56
5.2	Saran	57

DAFTAR PUSTAKA.....

58

LAMPIRAN.....

60



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku (Tahun 2016—2019)	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	36
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	46
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Data	48
Tabel 4.3 Hasil Uji Asumsi Multikolinearitas	49
Tabel 4.4 Analisis Regresi Linear Berganda	51
Tabel 4.5 Hasil Uji Hipotesis F	52
Tabel 4.6 Koefisien Determinasi	53
Tabel 4.7 Hasil Uji Hipotesis t	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 34

Gambar 4.1 Grafik Scater Plot..... 50



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah pajak restoran, jumlah pajak hotel dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Jumlah Pajak Restoran, Serta Jumlah Pajak Hotel dan Pajak Jumlah Retribusi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Sedangkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Jumlah Pajak Restoran dan Jumlah Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Dan secara parsial menunjukan hasil bahwa variabel Jumlah Pajak Retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019.

Kata Kunci : Jumlah Pajak Restoran, Jumlah Pajak Hotel, Retribusi, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the number of restaurant taxes, the amount of hotel taxes and retribution, the Local Own-source Revenue (PAD) of East Java in 2019. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. Based on the results of the research and discussion that have been described in the previous chapter, the test results simultaneously show that the Amount of Restaurant Tax, as well as the Amount of Hotel Tax and Tax Retribution Amount have a significant effect on the Local Own-source Revenue (PAD) of East Java in 2019. Meanwhile, the partial test shows that the variable Amount of Restaurant Tax and Amount of hotel tax have a significant effect on Local Own-source Revenue (PAD) of Esat Java ini 2019. And partially shows the results that the variable Amount of Retribution has no significant effect on Local Own-source Revenue (PAD) of East Java ini 2019.

Keywords: *Total Restaurant Tax, Total Hotel Tax, Retribution, Local Own-source Revenue*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk negara kepulauan adalah Indonesia (*Archipelagic State*) terbesar di dunia dengan keanekaragaman alam, seni budaya, dan adat istiadatnya yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Sektor yang menjadi penunjang utama perekonomian di Indonesia yaitu pariwisata. Menurut (Nizar, 2011) sektor pariwisata sudah berubah dan berevolusi menjadi salah satu industri besar dunia. Perkembangan pariwisata diharapkan dapat terus menaikkan kedatangan para wisatawan dalam negeri maupun asing untuk mengunjungi objek wisata yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga sektor pariwisata mampu memberikan sumbangsih pendapatan negara di Indonesia.

Salah satu unsur dari penerimaan negara adalah PAD. Menurut Rachim(2015) penerimaan daerah adalah keseluruhan uang yang masuk ke kas daerah, pengertian ini harus dibedakan dengan pengertian pendapatan asli daerah karena tidak semua penerimaan daerah merupakan pendapatan asli daerah.

Dalam hal ini, Pemasukan asli daerah biasa diakui sebagai kekayaan bersih sebagai penambah kekayaan. Salah satu sumber ekonomi dan dasar untuk meningkatkan pendapatan diantaranya adalah PAD. Menurut Sari (2013) tingkat kemandirian suatu daerah akan semakin baik seiring dengan meningkatnya PAD.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu pada pasal 79 UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan

bahwa pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah (Abdullah, 2013). Dengan semakin banyaknya sumber-sumber PAD yang dimiliki, maka sumber pendapatan daerah akan semakin banyak sehingga dapat diwujudkan dengan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 1 tentang Pemberian pengelolaan pemerintahan oleh Pemerintah kepada otonom daerah agar bisa mengurus dan mengatur sistem ke pemerintahannya dalam negara republik indonesia. Penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pemda dan DPRD menganut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Pemerintah pusat tidak lagi mengatur, mendominasi pemerintah dan masyarakat daerah. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

Potensi-potensi pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan sah lainnya di kabupaten/kota provinsi jawa timur harusnya juga dapat di optimalkan lagi untuk menunjang peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten/kota provinsi jawa timur.

Biasanya penerimaan PAD untuk masing-masing daerah berbeda dengan yang lainnya, rendahnya PAD merupakan indikasi nyata di mana masih besarnya ketergantungan daerah kepada pusat terhadap pembiayaan pembangunan baik langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut disebabkan di samping rendahnya potensi PAD di daerah juga disebabkan kurang intensifnya pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Kriteria yang biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri

adalah dengan peningkatan PAD berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk pemerataan pembangunan daerah, meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat (Brata Kusumah, 2001: 264).

Terdapat beberapa alasan mengapa pariwisata perlu untuk dikembangkan terutama bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia. Pertama, adanya motivasi seseorang untuk berwisata merupakan peluang bagi suatu wilayah dengan potensi wisata untuk menjadi media pemenuhan kebutuhan. Kedua, dengan menjadi media pemenuhan kebutuhan tersebut, maka ada berbagai keuntungan yang dapat diraih. Ketiga, bagi negara sedang berkembang, industri pariwisata merupakan media pembangunan ekonomi yang tidak memerlukan investasi besar dalam jangka panjang. Keempat, sektor pariwisata dapat mengurangi ketergantungan impor karena barang modal dan barang habis pakai dapat disediakan oleh destinasi pariwisata. Kelima, peran pariwisata yang sangat besar dalam perekonomian dunia memberi peluang yang lebih besar bagi Indonesia untuk menarik segmen pasar dari negara-negara maju. Keenam, industri pariwisata dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Provinsi terluas di pulau Jawa ini secara administratif terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota, 666 kecamatan, dan 8.501 desa/kelurahan (BPS, 2020). Populasi penduduknya mencapai sekitar 39,69 juta jiwa, terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat.

Tabel 1.1 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku (Tahun 2016—2019)

Lapangan Usaha	2016*	2017**	2018*	2019*
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,44	12,8	11,9	11,43
B. Pertambangan dan Penggalan	3,77	4	4,28	4,03
C. Industri Pengolahan	28,91	29,12	29,73	30,24
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,33	0,33	0,31	0,29
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,009
F. Konstruksi	9,73	9,82	9,7	9,36
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,9	17,93	18,19	18,46
H. Transportasi dan Pergudangan	3,38	3,44	3,43	3,43
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,65	5,77	5,79	5,92
J. Informasi dan Komunikasi	4,59	4,62	4,53	4,58
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,78	2,73	2,71	2,65
L. Real Estat	1,61	1,59	1,62	1,65
M,N. Jasa Perusahaan	0,8	0,81	0,83	0,84
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,33	2,27	2,31	2,38
P. Jasa Pendidikan	2,67	2,63	2,59	2,64
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,62	0,63	0,62	0,63
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,39	1,36	1,36	1,36
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100

Sumber : BPS diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa distribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2016-2019 selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan kemajuan pariwisata dan keseriusan pemerintah provinsi Jawa Timur dalam mengembangkan sektor pariwisatanya.

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Pada umumnya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata mempunyai tingkat sosial ekonomi yang tinggi yang memiliki trend hidup dan waktu senggang serta pendapatan (income) yang relatif besar. Artinya dengan kebutuhan hidup minimum

yang sudah terpenuhi, mempunyai cukup uang untuk membiayai perjalanan wisata.

Dengan keberadaan pariwisata, tentu akan menyebabkan adanya berbagai hasil di berbagai sektor antara lain sektor lingkungan, sosial budaya dan segi ekonomi. Ditinjau dari ekonomi dengan adanya pariwisata menyebabkan berbagai macam dampak meliputi dampak langsung, dampak tidak langsung dan dampak lanjutan. Dampak langsungnya adalah bagi pekerja di kawasan wisata tersebut termasuk pemerintah daerah. Dampak tidak langsungnya salah satunya bisa berupa meningkatnya permintaan akan transportasi umum public. Dan dampak berkelanjutannya tentu berhubungan dengan pemerintah dan masyarakat yang bekerja di bidang pariwisata atau pun tidak secara langsung tetapi mendapatkan dampak positifnya.

Menurut Tambunan yang dikutip oleh Rudy Badrudin (2001), bahwa industri pariwisata yang menjadi sumber PAD adalah industri pariwisata milik masyarakat daerah (Community Tourism Development atau CTD). Dengan mengembangkan CTD pemerintah daerah dapat memperoleh peluang penerimaan pajak dan beragam retribusi resmi dari kegiatan industri pariwisata yang bersifat multisektoral, yang meliputi hotel, restoran, usaha wisata, usaha perjalanan wisata, profesional convention organizer, pendidikan formal dan informal, pelatihan dan transportasi. Sedangkan pariwisata itu sendiri merupakan industri jasa yang memiliki mekanisme pengaturan yang kompleks karena mencakup pengaturan pergerakan wisatawan dari daerah atau negara asal, ke daerah tujuan wisata, hingga kembali ke negara asalnya yang melibatkan berbagai komponen seperti biro perjalanan, pemandu wisata (guide), tour operator, akomodasi, restoran, artshop, moneychanger, transportasi dan yang lainnya.

Pariwisata juga menawarkan jenis produk dan wisata yang beragam, mulai dari

wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata buatan, hingga beragam wisata minat khusus.

Keberhasilan dalam pengembangan sektor pariwisata, berarti akan meningkatkan perannya dalam memberikan sumbangan yang besar terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur. Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengatur terkait pengembangan sektor pariwisata dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 pasal 10 ayat 5 Tentang Pengembangan Daya Tarik Wisata menyebutkan bahwa strategi menyediakan ruang untuk investasi sektor industri, pariwisata, pertanian, perkebunan dan kehutanan salah satunya adalah pengembangan obyek dan fasilitas pariwisata.

Fasilitas yang ada pada daerah wisata menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk mempengaruhi peningkatan pajak dan redistribusi. Semakin lengkap dan nyaman fasilitas yang tersedia di daerah wisata tersebut maka akan menarik wisatawan untuk datang karena mereka merasa apa yang mereka butuhkan saat melakukan perjalanan wisatanya menjadi lebih nyaman dan tenang. Fasilitas tersebut dapat berupa banyaknya restoran, banyaknya hotel dan lahan parkir yang tersedia di daerah tersebut. Ketiga fasilitas tersebut nantinya akan memberikan dampak yang positif kepada pajak dan redistribusi daerah yang nantinya akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti tentang **“Pengaruh Jumlah Pajak Restoran, Jumlah Pajak Hotel Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur”**. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variable Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variable dependent (Y) dan Jumlah Pajak Restoran (X_1), Jumlah Pajak Hotel (X_2) dan Retribusi (X_3) sebagai variable independent (X).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan disebutkan berdasarkan pemaparan latar belakang yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Pajak Restoran, Jumlah Pajak Hotel Dan Retribusi secara simultan dan parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Pajak Restoran, Jumlah Pajak Hotel Dan Retribusi secara simultan dan parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab pengaruh jumlah pajak pada sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan variabel independen jumlah pajak restoran, jumlah pajak hotel, serta retribusi. Dan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependent. Sehingga akan memberikan pengetahuan mengenai pengaruh sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur.

1.4.2 Pengambil Kebijakan

Sebagai referensi bagi pemerintah dan pengambil kebijakan agar lebih memberikan perhatian khusus untuk pengembangan dan penguatan sektor pariwisata di Provinsi Jawa Timur, seperti meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Daerah Wisata Provinsi Jawa Timur agar sektor pariwisata tetap berkembang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Penerimaan Daerah

Menurut Nurcholis (2007:182) sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Puranata (2010) menyatakan bahwa ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan semakin kecil hal ini dikarenakan kemampuan suatu daerah mengelola pendapatannya dari PAD yang didapatkan. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah, dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Objek PAD antara lain untuk provinsi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, retribusi pelayanan kesehatan dan lain-lain.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan otonomi daerah yaitu kewenangan daerah otonom untuk pemerintahan (Rahayu, 2002). Peranan PAD dalam keuangan daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab di lingkungannya masing-masing. Semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan yang bersifat mandiri, dan semakin besar pula kekuasaan daerah yang bersangkutan untuk mengarahkan penggunaan keuangan sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan skala prioritas daerah yang

bersangkutan. Berdasarkan pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dijelaskan, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- 1) Hasil Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan menurut Darise (2007) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan antara Pemerintah Daerah. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut (Siahaan, 2010)."

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu diharapkan

peningkatannya. Hasil penelitian yang dilakukan Roerkaerts dan Savat (Spillane, 1987: 138) menjelaskan bahwa manfaat sektor yang dapat diberikan sektor pariwisata adalah menambah pemasukan dan pendapatan, baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Dengan demikian sektor pariwisata yang ada di setiap daerah dapat menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Penambahan ini bisa dilihat dari meningkatnya pendapatan dari kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat berupa menyediakan penginapan, rumah makan, dan penyedia oleh-oleh atau cinderamata. Kegiatan usaha tersebut merupakan potensi dalam menambah pendapatan asli daerah (PAD), sehingga perekonomian daerah dapat ditingkatkan dan akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Djaenuri (2012) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Taufiq (2004) pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Rahayu (2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan otonomi daerah yaitu kewenangan daerah otonom untuk pemerintahan. Peranan PAD dalam keuangan daerah merupakan salah satu tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dilingkungannya masing-masing. Semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan yang bersifat mandiri, dan semakin besar pula kekuasaan daerah yang

bersangkutan untuk mengarahkan penggunaan keuangan sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan skala prioritas daerah yang bersangkutan.

2.1.3 Pariwisata

Dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Definisi pariwisata menurut World Tourism Organisation (WTO), merupakan suatu kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya.

Pariwisata mempunyai peran dalam pembangunan negara secara makro meliputi tiga segi yaitu:

1. Segi ekonomis, seperti sumber devisa dan pajak-pajak
2. Segi social, seperti penciptaan lapangan kerja, dan
3. Segi Kebudayaan, seperti memperkenalkan kebudayaan kepada wisatawan

Ketiga segi tersebut tidak saja berlaku bagi para wisatawan asing, tetapi juga berlaku untuk para wisatawan domestik yang kian meningkat peranannya (Spillane, 1994). Dalam literatur, hubungan pariwisata dengan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui dua pendekatan, yaitu: **pertama**, pendekatan *Keynesian* tentang pengganda (*multiplier*), yang memperlakukan pariwisata internasional sebagai komponen eksogen dari permintaan agregat yang mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan, dan arena itu terhadap lapangan kerja melalui proses *multiplier*. Sama halnya pada pariwisata daerah, yang memberikan pengaruh positif bagi pendapatan daerah. Namun, pendekatan

ini menerima kritik karena agak statis dan tidak memungkinkan untuk menyimpulkan dampak pariwisata dalam jangka panjang.

Kedua, pendekatan *model pertumbuhan endogen dua sektor Lucas*, yang penggunaannya untuk sektor pariwisata dipelopori oleh Lanza dan Pigliaru (1995). Dalam model ini pariwisata dikaitkan dengan kondisi maksimisasi laju pertumbuhan. Apabila produktivitas menjadi elemen utama dari pertumbuhan, dengan asumsi kemajuan teknologi di sektor manufaktur lebih tinggi dibandingkan sektor pariwisata, maka spesialisasi pariwisata akan mendorong pertumbuhan.

Hal ini bias terjadi hanya apabila perubahan nilai tukar perdagangan (*terms of trade*) antara pariwisata dan barang-barang manufaktur lebih dari sekedar menyeimbangkan kesenjangan teknologi (*technological gap*) sektor pariwisata.

Kondisi tersebut berlaku apabila elastisitas substitusi antara pariwisata dan barang manufaktur inelastisitas.

Beberapa argument lain melihat keterkaitan antara pariwisata dan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada dampak ekonomi makro dari pariwisata, yaitu: *pertama*, pariwisata memiliki dampak langsung terhadap perekonomian, antara lain terhadap penciptaan lapangan kerja, redistribusi pendapatan, dan penguatan neraca pembayaran. Belanja turis, sebagai bentuk alternatif dari ekspor memberikan kontribusi berupa penerimaan devisa (neraca pembayaran), dan pendapatan yang diperoleh dari ekspansi pariwisata. Penerimaan devisa dari pariwisata juga bisa digunakan untuk mengimpor barang-barang modal untuk menghasilkan barang-barang dan jasa, yang pada gilirannya menyebabkan pertumbuhan ekonomi.

Kedua, efek stimulasi (*induced effects*) terhadap pasar produk tertentu, sektor pemerintah, pajak dan efek imitasi (*imitation effect*) terhadap komunitas.

Salah satu manfaat utama bagi komunitas lokal yang diharapkan dari pariwisata

adalah kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian daerah, terutama peningkatan pendapatan dan pekerjaan baru di daerah. Pelaku bisnis di daerah tentu saja memperoleh manfaat langsung dari belanja turis. Karena pelaku bisnis membayar pekerja dan arena pelaku bisnis dan pekerja membelanjakan kekayaan mereka yang meningkat, maka secara keseluruhan komunitas di daerah juga memperoleh manfaat. Sehingga uang yang dibelanjakan oleh turis adalah uang baru dalam perekonomian daerah, bukan kekayaan sebelumnya yang digunakan kembali (*recycling*).

2.1.3.1 Komponen Pariwisata

Sistem pariwisata terdiri dari tujuh komponen besar, dimana komponen tersebut merupakan sektor utama dalam kepariwisataan yang memerlukan keterkaitan, ketergantungan dan keterpaduan, yaitu:

1) Sektor Pemasaran

Mencakup semua unit pemasaran dalam industri pariwisata, misalnya kantor biro perjalanan dengan jaringan cabangnya, kantor pemasaran maskapai penerbangan (*air lines*), kantor promosi daerah tujuan wisata tertentu, dan sebagainya.

2) Sektor Perhubungan

Mencakup semua bentuk dan macam transportasi publik, khususnya yang beroperasi sepanjang jalur transit yang menghubungkan tempat asal wisatawan (*traveller generating region*) dengan tempat tujuan wisatawan (*tourist destination region*). Misalnya, perusahaan penerbangan (*airlines*), bus (*coachline*), penyewaan mobil, kereta api, dan sebagainya.

3) Sektor Akomodasi

Sebagai penyedia tempat tinggal sementara (penginapan) dan pelayanan yang berhubungan dengan hal itu, seperti penyediaan makanan dan minuman

(*food and beverage*). Sektor ini umumnya berada di daerah tujuan wisata dan tempat transit.

4) Sektor Daya Tarik/Atraksi Wisata

Sektor ini terfokus pada penyediaan daya tarik atau atraksi wisata bagi wisatawan. Lokasi utamanya terutama pada daerah tujuan wisata tetapi dalam beberapa kasus juga terletak pada daerah transit. Misalnya, taman budaya, hiburan (*entertainment*), event olah raga dan budaya, tempat dan daya tarik wisata alam, peninggalan budaya, dan sebagainya. Jika suatu daerah tujuan wisata tidak memiliki sumber daya atau daya tarik wisata alam yang menarik, biasanya akan dikompensasi dengan memaksimalkan daya tarik atraksi wisata lain.

5) Sektor Tour Operator

Mencakup perusahaan penyelenggara dan penyedia paket wisata. Perusahaan ini membuat dan mendesain paket perjalanan dengan memilih dua atau lebih komponen (baik tempat, paket, atraksi wisata) dan memasarkannya sebagai sebuah unit dalam tingkat harga tertentu yang menyembunyikan harga dan biaya masing-masing komponen dalam paketnya.

6) Sektor Pendukung/rupe-rupe

Sektor ini mencakup pendukung terselenggaranya kegiatan wisata baik di negara/ tempat asal wisatawan, sepanjang rute transit, maupun di negara/tempat tujuan wisata. Misalnya, toko oleh-oleh (*souvenir*) atau took bebas bea (*duty free shops*), restoran, asuransi perjalanan wisata, travel cek (*traveller cheque*), bank dengan kartu kredit, dan sebagainya.

7) Sektor Pengkoordinasi/regulator

Mencakup peran pemerintah selaku regulator dan asosiasi di bidang pariwisata selaku penyelenggara pariwisata, baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional. Sektor ini biasanya menangani perencanaan dan fungsi

manajerial untuk membuat sistem koordinasi antara seluruh sektor dalam industri pariwisata. Misalnya, di tingkat lokal dan nasional seperti Departemen Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi (Disparda), Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI), dan sebagainya. Di tingkat regional dan internasional seperti World Tourism Organization (WTO), Pacific Asia Travel Association (PATA), dan sebagainya.

2.1.3.2 Pelaku Pariwisata

Pelaku pariwisata adalah setiap pihak yang berperan dan terlihat dalam kegiatan pariwisata. Adapun yang menjadi pelaku pariwisata menurut Damanik dan Weber adalah sebagai berikut:

- 1) Wisatawan merupakan konsumen atau pengguna produk dan layanan. Wisatawan memiliki beragam motif dan latar belakang (minat, ekspektasi, karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya) yang berbeda-beda dalam melakukan kegiatan wisata. Dengan perbedaan tersebut, wisatawan menjadi pihak yang menciptakan permintaan produk dan jasa wisata.
- 2) Industri Pariwisata/Penyedia Jasa, adalah semua usaha yang menghasilkan barang dan jasa bagi pariwisata. Mereka dapat digolongkan ke dalam empat golongan utama, yaitu: Pelaku langsung (hotel, restoran, biro perjalanan, pusat informasi wisata, atraksi hiburan, dan lain-lain); pelaku tidak langsung (usaha kerajinan tangan, penerbit buku, lembaran panduan wisata); pendukung jasa wisata (penyedia jasa fotografi, jasa kecantikan, olahraga, penjualan BBM), pemerintah, masyarakat local, dan LSM.

2.1.4 Jumlah Pajak Restoran

Menurut Suarhana (2006), Restoran merupakan tempat usaha yang komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan pelayanan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya. Sedangkan Menurut Ninemeier dan Hayes

(2011), Restoran adalah suatu operasi layanan makanan yang mendatangkan keuntungan yang mana basis utamanya termasuk didalamnya adalah penjualan makanan dan minuman kepada individu atau tamu-tamu.

Menurut Sukirno (2002), menyatakan aliran pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah akan mempengaruhi pendapatan kepada pihak pemerintah dan merupakan sumber pendapatan yang utama. Hal ini berarti kontribusi dari pajak restoran dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya PAD.

2.1.5 Jumlah Pajak Hotel

Menurut Dinas Pariwisata, hotel merupakan suatu usaha yang menggunakan bangunan atau sebagian dari padanya yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Seiring perkembangan jaman, maka pembangunan hotel berkembang dengan sangat pesat, baik itu pendirian hotel baru atau pengadaan kamar baru pada hotel-hotel yang ada. Fungsi hotel tidak hanya sebagai tempat menginap untuk tujuan wisata namun juga untuk tujuan lain seperti menjalankan kegiatan bisnis, mengadakan seminar, atau sekedar untuk mendapatkan ketenangan. Perhotelan memiliki peran sebagai penggerak pembangunan daerah, perlu dikembangkan secara baik dan benar sehingga dapat mengakibatkan pendapatan masyarakat, PAD, penyerapan tenaga kerja serta perluasan usaha. Hotel merupakan salah satu jenis usaha yang menyiapkan pelayanan jasa bagi masyarakat dan wisatawan.

Menurut Cohen (1984) salah satu dampak positif dari sektor pariwisata adalah meningkatnya pendapatan Pemerintah. Pramono (1993) juga berpendapat serupa yakni sektor pariwisata memiliki dampak terhadap pembangunan regional. Salah satu factor terpenting dalam penunjang pariwisata di suatu daerah adalah

ketersediaan objek wisata atau daya tarik wisata. Daya tarik wisata yang banyak dan beranekaragam akan mengundang wisatawan baik wisatawan asal domestik maupun wisatawan asing untuk berkunjung ke suatu daerah. Kedatangan pengunjung ke objek wisata akan menggerakkan perekonomian karena akan memberikan pendapatan terhadap objek wisata tersebut yang nantinya akan berpengaruh pada penerimaan sektor pariwisata.

Sektor yang tak kalah penting dalam peningkatan PAD terutama pada bidang pariwisata adalah hotel. Hotel merupakan sarana pokok pariwisata (main tourism superstructures) yang berfungsi memberikan pelayanan kepada wisatawan. Wisatawan yang datang ke suatu daerah membutuhkan tempat singgah untuk sementara dan butuh fasilitas yang menyediakan makanan dan minuman. Kunjungan wisatawan ke hotel akan dikenakan biaya akan menambah pemasukan pribadi atau badan yang mengusahakan sarana tersebut. Nantinya, mereka akan membayar pajak kepada pemerintah daerah yang akan turut meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, biasanya adanya hotel di suatu daerah dikarenakan permintaan atas hotel yang tinggi. Semakin banyak hotel yang dibangun, maka akan semakin besar pula retribusi yang diberikan kepada pemerintah melalui retribusi mendirikan usaha.

Salah satu faktor lainnya yang mempengaruhi peningkatan PAD di bidang pariwisata adalah pendapatan masyarakat yang dalam hal ini diwakilkan oleh pendapatan perkapita. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, maka masyarakat sekitar dapat mempunyai pilihan untuk mengunjungi restoran-restoran, tempat hiburan seperti menonton bioskop, mengunjungi pameran atau mengunjungi pagelaran kesenian. Kepariwisataan di suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh wisatawan luar daerah, tetapi juga dari dalam daerah itu sendiri. Melalui hal itulah pendapatan perkapita

2.1.6 Retribusi

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran pada negara yang dilakukan oleh orang/ badan yang menggunakan jasa yang disiapkan oleh negara.

Jadi retribusi merupakan iuran kepada negara oleh orang / badan yang menggunakan jasa yang disiapkan oleh pemerintah. Orang/ badan yang tidak menggunakan jasa yang disiapkan oleh pemerintah, tidak diwajibkan membayar retribusi. Retribusi mempunyai jasa yang secara langsung dinikmati oleh pembayaran retribusi.

Retribusi (juga disebut bea) daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran disebabkan pemakai atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha atau milik bagi daerah yang berkepentingan atau karena yang diberikan oleh daerah baik daerah langsung maupun tidak langsung. Retribusi daerah berdasarkan Undang-undangan nomor 34 tahun 2000 dan peraturan pemerintah (PP) nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah bahwa “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Selanjutnya, Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang ketentuan umum Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Sedangkan Retribusi Daerah menurut (Marihot pahala siahaan, 2013:5) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi pendudukan secara perorangan.

Dari definisi dan pengertian tentang Retribusi Daerah sebagaimana tersebut diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Retribusi daerah adalah

pungutan daerah kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang daerah memberikan kewenangan kepada daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengolah sumber keuangannya sendiri. Dalam menggali keuangannya tersebut tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber pendapatan asli daerah. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah semestinya diimplementasikan sebagaimana mestinya dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di samping sumber-sumber pendapatan yang lain.

Pariwisata dikembangkan di suatu daerah dengan berbagai alasan utama adalah untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan masuknya devisa bagi daerah dan negara, peningkatan dan pendapatan masyarakat dan pemerintah pariwisata juga mendorong proses perlindungan terhadap suatu lingkaran fisik maupun social budaya dari masyarakat setempat, karena hal tersebut merupakan asset yang dapat dijual kepada wisatawan dan jika ingin berlanjut maka harus di pertahankan. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan manfaat dan mengurangi berbagai masalah yang di timbulkan dengan adanya pengembangan pariwisata, maka diperlukan perencanaan yang baik dan manajemen yang baik pula. Dengan adanya pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana sector pariwisata khususnya wisata alam, wisata budaya, dan pariwisata pantai, pemerintah kota palopo berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya terutama yang bersumber dari sector pariwisata Jenis dan Golongan Retribusi Daerah.

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah bahwa golongan retribusi daerah terdiri dari tiga

golongan, yakni Retribusi jasa Umum, Retribusi jasa Usaha, dan Retribusi Jasa, Perizinan tertentu.

a. Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persembahkan/ Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pera;
10. Retribusi Pengujian Kapal

b. Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: (1) Pelayanan

dengan menggunakan /memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan (2) Pelayanan oleh pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memandai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/ atauPertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan kepelabuhanan,
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10. Retribusi Perizinan Tertentu
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasab atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Perhitungan Retribusi Daerah Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian,besarnya retribusi

yang terutang dihitung berdasarkan tariff retribusi dan tingkat penggunaan jasa Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah Untuk menilai tingkat keefektifitasan dari pemungutan retribusi daerah ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Kecukupan dan Elastisitas retribusi responsif kepada pertumbuhan pendudukan dan pendaptan, selain ini juga tergantung pada ketersediaan modal untuk memenuhi pertumbuhan pendudukan
- b. Keadilan, dalam pemungutan retribusi daerah berdasarkan asa keadilan, yaitu diseduaiakan dengan kemampuan dan manfaat yang diterima
- c. Kemampuan Administrasi, Dalam hal ini retribusi mudah ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggung jawab di dasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur. Mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatakn apa yang mereka bayar, jika tidak dibayar maka pelayanan dihentikan.

2.1.7 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output*, yang diukur dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di dalam suatu wilayah (Adisasmita, 2013).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, *output* perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi ini artinya suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat, tetapi melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Hal ini ditekankan pada perubahan atau perkembangan itu sendiri (Boediono, 1999).

Perkembangan ekonomi mengandung arti yang lebih luas dan mencakup perubahan pada setiap susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk pada suatu negara dalam jangka waktu panjang yang disertai perbaikan sistem kelembagaan.

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*).

2.1.7.1 Pertumbuhan (*growth*), tujuan yang pertama yaitu mencegah terjadinya kelangkaan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya alam agar dapat dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif sehingga mendorong pertumbuhan.

2.1.7.2 Pemerataan (*equity*), dalam hal ini memiliki implikasi dalam pencapaian tujuan yang kedua yaitu sumber daya berkelanjutan, oleh karena itu tidak boleh hanya fokus pada satu daerah saja sehingga manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat dinikmati oleh semua pihak dengan adanya pemerataan.

2.1.7.3 Berkelanjutan (*sustainability*), sedangkan tujuan berkelanjutan yaitu pembangunan daerah harus memenuhi syarat-syarat bahwa penggunaan sumber daya baik yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun diluar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas kemampuan produksi (Afrizal, 2013).

2.1.8 Teori Pembangunan Daerah

Menurut Arsyad (2016), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola setiap sumberdaya

yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Secara umum tujuan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut: pertama, mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk. Kedua, mencapai peningkatan ekonomi daerah. Ketiga, mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja.

Menurut Sjafrizal (2008) dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, perlu adanya strategi pengembangan ekonomi daerah yang baik dan terarah agar mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi sendiri erat kaitannya dengan strategi pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan daerah pada dasarnya merupakan cara atau jalan terbaik untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula. Karena itu strategi yang baik dan tepat akan menghasilkan pencapaian tujuan secara tepat dan terarah sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Menurut Arsyad (2016), strategi pembangunan daerah dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

a. Strategi Pengembangan Fisik atau Lokalitas.

Dilakukan dengan program perbaikan kondisi fisik atau lokalitas daerah untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan. Tujuannya untuk menciptakan identitas daerah atau kota, memperbaiki basis pesona atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki dunia usaha daerah.

b. Strategi Pengembangan Dunia Usaha

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena daya Tarik, kreasi atau daya perekonomian daerah yang sehat.

c. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi.

d. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan pembangunan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan suatu kelompok masyarakat di suatu daerah atau dikenal dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial, misalnya, melalui penciptaan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh keuntungan dari usahanya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna sebagai salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait yang digunakan untuk membantu proses penyusunan penelitian:

1. Hadli Lidya Rikayana dan Nurhasanah (2020) dengan judul "The Effect of Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax and The Number of Tourists on Locally-Generated Revenue at Bintan Districts". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bintan tahun 2015-2018. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data time series dengan teknik pengumpulan data berupa teknik observasi dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

karena nilai signifikansi $0,030 > 0,05$. (2) pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah karena nilai signifikansi $0,929 < 0,05$. (3) pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah karena nilai signifikansi $0,074 > 0,05$. (4) jumlah wisatawan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah karena nilai signifikansi $0,047 > 0,05$. (5) pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah karena nilai signifikansi $0,001 < 0,05$.

2. Francis Chinedu Egbunike, Ochuko Benedict Emudainohwo, dan Ardi Gunardi (2018) dengan judul "Tax Revenue and Economic Growth: A Study of Nigeria and Ghana". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi Nigeria dan Ghana. Penelitian ini menggunakan teknik regresi berganda sebagai alat analisis. Studi ini menemukan dampak positif yang signifikan dari pendapatan pajak pada produk domestik bruto Nigeria dan Ghana. Studi tersebut menyatakan bahwa untuk memastikan pendapatan yang dihasilkan dari pajak dimanfaatkan secara efektif untuk mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian. Untuk memastikan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari pajak dimanfaatkan secara efektif untuk mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian.

3. Okeke, Moses Nnoruga. Mbonu, Chikwelu M. Amahalu Nestor Ndubuisi (2018) dengan judul "Effect of Tax Revenue On Economic Development In Nigeria". Penelitian ini mengkaji pengaruh penerimaan pajak terhadap perkembangan ekonomi di Nigeria selama periode 1994 -2016. Data diperoleh dari Bank Sentral Nigeria, Kantor Federal Inland Revenue Service dan Abstrak Tahunan statistik dari Biro Statistik Nasional. Penelitian ini didasarkan pada data time series. Uji Augmented Dickey

Fuller, regresi linier berganda, uji Multikolinearitas, uji Granger Causality, uji kointegrasi Johansen dan model koreksi kesalahan digunakan dalam analisis data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan pajak memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan partisipasi sekolah dasar, harapan hidup dan pendapatan per kapita, di Nigeria pada tingkat signifikansi 5% masing-masing. Atas dasar temuan, direkomendasi antara lain bahwa karena pendapatan pajak telah terbukti berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Nigeria.

4. Sigit sanjaya (2020) dengan judul “Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pajaknya serta Dampaknya pada Pendapatan Asli Daerah di Sumatra Barat”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah hotel dan restoran terhadap penerimaan pajaknya serta dampaknya pada pendapatan asli daerah di Sumatra Barat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Sumatra Barat, jumlah restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Sumatra Barat, penerimaan pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Sumatra Barat, penerimaan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Sumatra Barat, jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Sumatra Barat, jumlah restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap penerimaan pajak restoran di Sumatra Barat.

5. Wijaya dan Sudiana (2016) dengan judul “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangli

Periode 2009-2015". Menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dan menggunakan *software Eviews-8*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap retribusi obyek wisata. Kunjungan wisatawan, pajak hotel, restoran dan retribusi obyek wisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1.	Hadli Lidy dan Rikayana dan Nurhasanah (2020), "The Effect of Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax and The Number of Tourists on Locally-Generated Revenue at Bintan Districts	Independen: X1=pajak hotel X2=pajak restoran X3=pajak hiburan X4=jumlah wisatawan Dependen: Y=pendapatan asli daerah	Regresi Linear Berganda.	1) Pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah karena nilai signifikansi $0,030 > 0,05$. 2) Pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah karena nilai signifikansi $0,929 < 0,05$. 3) Pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah karena nilai signifikansi $0,074 > 0,05$. 4) Jumlah wisatawan berpengaruh

				terhadap pendapatan asli daerah karena nilai signifikansi $0,047 > 0,05$.
				5) Pajak hotel, pajak restoran Pajak hiburan berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah karena nilai signifikansi $0,001 < 0,05$.
2.	Francis Chinedu Egbunike, Ochuko Benedict Emudainohwo, dan Ardi Gunardi (2018), "Tax Revenue and Economic Growth: A Study of Nigeria and Ghana"	Independen: X_1 =pajak Dependen: Y =pertumbuhan ekonomi	Regresi Linear Berganda	Pendapatan pajak berdampak positif signifikan pada produk domestik bruto Nigeria dan Ghana.
3.	Okeke, Moses Nnoruga. Mbonu, Chikwelu M. Amahalu Nestor Ndubuisi (2018), "Effect of Tax Revenue On Economic Development In Nigeria".	Independen: X_1 =penerimaan pajak Dependen: Y =perkembangan ekonomi	Regresi Linier Berganda	pendapatan pajak memiliki hubungan yang signifikan secara statistic. karena pendapatan pajak telah terbukti berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Nigeria.
4.	Sigit sanjaya (2020), "Pengaruh Jumlah Hotel dan	Independen: X_1 : Jumlah Hotel Mancanegara	Regresi Linier Berganda	1) jumlah hotel berpengaruh positif dan

Restoran terhadap Penerimaan Pajaknya serta Dampaknya pada Pendapatan Asli Daerah di Sumatra Barat”	X2 : Jumlah Restoran X3 : Penerimaan Pajak Dependen: Y= Pendapatan Asli Daerah	signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Sumatra Barat 2) jumlah restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Sumatra Barat 3) penerimaan pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Sumatra Barat 4) penerimaan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Sumatra Barat 5) jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel
---	--	---

				di Sumatra Barat
				6) jumlah restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di Sumatra Barat.
5.	Wijaya dan Sudiana (2016), "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015"	Independen: X1 : jumlah kunjungan wisatawan X2 : Penerimaan Pajak Hotel X3 : Restoran X4 : Retribusi Obyek Wisata Dependen: Y = Pendapatan Asli Daerah	regresi linier berganda (metode Ordinary Least Square (OLS))	Kunjungan wisatawan, pajak hotel, restoran dan retribusi obyek wisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015.

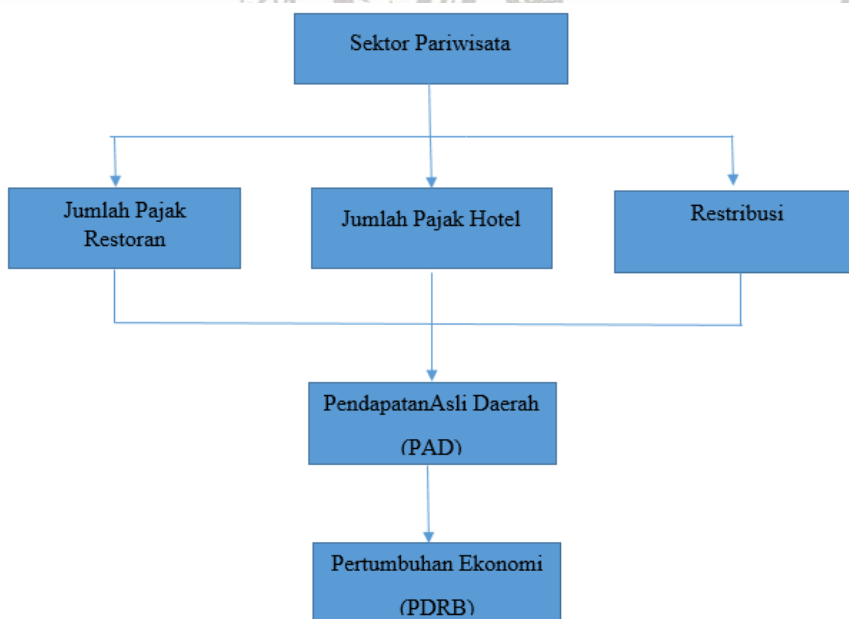
2.2.1 Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, diantaranya adalah obyek dalam penelitian ini yaitu Provinsi Jawa Timur. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah pajak restoran, dan jumlah pajak hotel, dan retribusi. Dan variabel dependen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data *cross-section*. Serta alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda.

2.3 Kerangka Pikir

Pengembangan pariwisata diharapkan dapat memperbesar penerimaan devisa, penerimaan pendapatan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, mendorong pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Variabel-variabel independen yaitu jumlah pajak restoran, jumlah pajak hotel, dan restribusi. Dimana, apabila banyak wisatawan yang berkunjung maka permintaan penyedia restoran, penyedia hotel, dan restribusi juga akan meningkat, ini akan berdampak pada pajak yang diterima oleh daerah tersebut sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

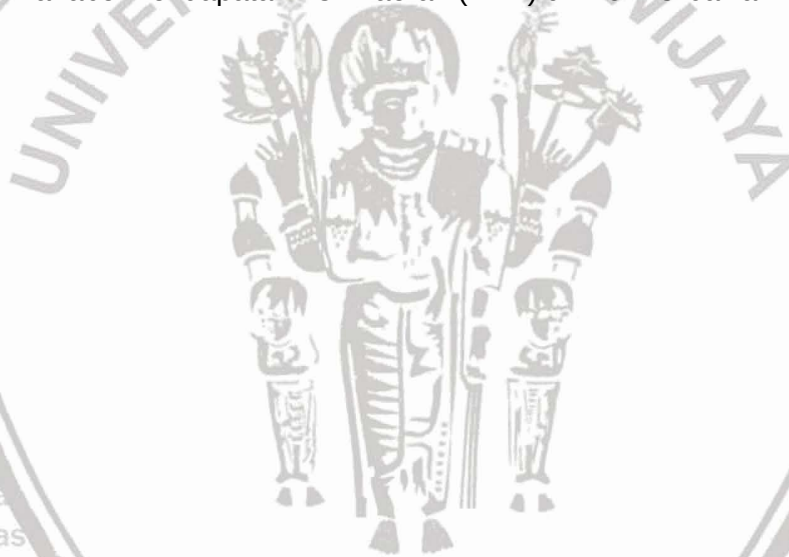


Sumber : Penulis, 2021

2.4 Hipotesis

Penelitian ini memiliki hipotesis sebagai:

- 1) H_1 : Variabel jumlah pajak restoran, jumlah pajak hotel dan retribusi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur.
- 2) H_2 : Variabel jumlah pajak restoran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur.
- 3) H_3 : Variabel jumlah pajak hotel secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur.
- 4) H_4 : Variabel retribusi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur.



BAB III**METODE PENELITIAN****3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variable bebas yaitu jumlah pajak restoran, jumlah pajak hotel, dan redistribusi terhadap variable terikat yaitu pendapatan asli daerah (PAD). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Sehingga, berdasarkan pengertian diatas maka dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari obyek yang diteliti, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori-teori dan literatur-literatur yang pengaruh sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini memiliki beberapa variable, yakni variable bebas dan variable terikat. Definisi dari variabel sebagai berikut:

1. Jumlah Pajak Restoran (X_1)

Jumlah pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran di Provinsi Jawa Timur. Jumlah pajak restoran dalam penelitian ini dihitung dalam satuan ribu rupiah pada tahun 2019.

2. Jumlah Pajak Hotel (X_2)

Jumlah pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel di Provinsi Jawa Timur. Jumlah hotel dalam penelitian ini dihitung satuan ribu rupiah pada tahun 2019.

3. Retribusi (X_3)

Retribusi adalah pembayaran pada negara yang dilakukan oleh orang/badan yang menggunakan jasa yang disiapkan oleh negara di Provinsi Jawa Timur. Restribusi dalam penelitian ini dihitung satuan ribu rupiah pada tahun 2019.

4. Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur yang tercatat di data BPS Provinsi Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penelitian ini dihitung dalam satuan ribu rupiah dari tahun 2019.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Pengertian	Sumber	Tahun
1.	Jumlah Pajak Restoran (X_1)	pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran di Provinsi Jawa Timur	Jatim.bps.go.id	tahun 2019
2.	Jumlah Pajak Hotel (X_2)	pajak atas pelayanan yang disediakan oleh	Jatim.bps.go.id	tahun 2019

		hotel di Provinsi Jawa Timur		
3	Retribusi (X_3)	pembayaran pada negara yang dilakukan oleh orang/ badan yang menggunakan jasa yang disiapkan oleh negara di Provinsi Jawa Timur..	Jatim.bps.go.id	tahun 2019
4	Pendapatan Asli Daerah (Y)	pendapatan asli daerah Provinsi jawa timur yang tercatat di data BPS Provinsi jawa timur. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jatim.bps.go.id	tahun 2019

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Kuncoro (2009:118) populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, biasanya berupa orang, objek, transaksi atau kejadian, dimana kita tertarik untuk mempelajarinya. Sampel merupakan suatu himpunan bagian dari unit populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berdasarkan jangka waktu yang diperoleh dari lembaga terkait yaitu Dinas Pariwisata dan BPS yaitu data jumlah pajak restoran, jumlah pajak hotel, dan retribusi serta Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan penelitian ini mengambil sampel pada tahun 2019.

Menurut Sugiyono (2017:118) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode Sample yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut :

1. Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2019

2. Memiliki data tentang variabel penelitian secara lengkap selama periode penelitian

3.4 Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa Pendapatan Asli Daerah, jumlah pajak restoran, jumlah pajak hotel, dan retribusi. Data kuantitatif adalah data yang biasanya disimpulkan dengan angka-angka, data seperti ini biasanya hasil transformasi dari data kualitatif yang memiliki perbedaan berjenjang. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data cross-section.

3.4.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu menggunakan data dalam bentuk laporan yang dipublikasikan oleh instansi berwenang. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Badan Pusat Statistik serta beberapa literature yang berkaitan dengan judul penelitian.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumestasi. Metode dokumestasi merupakan teknik merupakan teknik pengumpulan data yang didapatkan berupa dokumentasi, catatan yang dipublikasikan seperti laporan tahunan maupun bulanan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan memperoleh dokumen yang ada.

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan jumlah pajak restoran, jumlah pajak hotel, dan retribusi di Provinsi Jawa Timur.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Regresi

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model regresi berganda data cross section dan uji asumsi klasik untuk memprediksi apakah variabel independen (jumlah pajak restoran, jumlah pajak hotel, dan retribusi) mempengaruhi variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur.

Dengan model persamaan yang digunakan:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

dengan keterangan:

- α = Konstanta
- X_1 = Jumlah Pajak Restoran
- X_2 = Jumlah Pajak Hotel
- X_3 = Jumlah Pajak Retribusi
- $b(1,2,3)$ = parameter *intercept*
- e = Error term

Tingkat signifikansi (α) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% atau menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95%.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik ketika model tersebut memenuhi beberapa asumsi yang kemudian disebut dengan asumsi klasik. Dalam penelitian ini hanya menguji normalitas, multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Penelitian ini tidak menggunakan uji autokorelasi karena uji autokorelasi hanya digunakan untuk menguji data time series.

3.5.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011).

Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Statistik. Metode yang digunakan untuk mendeteksi distribusi residual tersebut adalah analisis Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan dari uji Kolmogorov-Smirnov didasarkan pada perbandingan significant level ($\alpha = 5\%$ atau $\alpha = 0.05$), yaitu :

- 1) Data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikan $> 0,05$
- 2) Data dinyatakan tidak berdistribusi normal jika nilai signifikan $< 0,05$.

3.5.4 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Multikolinieritas berarti ada hubungan linear yang “sempurna” atau “pasti” diantara beberapa atau semua variabel independen dari model regresi. Adapun cara pendeteksiannya adalah : jika multikolinearitas tinggi, seseorang mungkin memperoleh R^2 yang tinggi tetapi tidak satupun atau sangat sedikit koefisien yang ditaksir yang signifikan atau penting secara statistik (Sulaiman, 2004).

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Jika nilai VIF berada dibawah 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10 maka tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95% sehingga model tersebut bebas dari multikolinearitas (Ghozali, 2006).

3.5.5 Uji Heteroskedastisitas

Menurut ghozali (2011:139) uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas.

Dalam uji heterokedastisitas ini menggunakan scatter plot yang merupakan sebuah grafik yang diplot poin atau titik yang menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan residunya. Dasar membentuk pola tertentu atau teratur maka mengidentifikasi telah terjadi heterokedastisitas. Sebaliknya apabila titik-titik yang ada menyebar diatas dan dibawah angka 0 sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.6 Uji Hipotesis

Untuk mendapatkan model regresi dengan hasil yang terbaik (Best Linier Unbiased Estimator / BLUE) maka harus dilakukan beberapa uji seperti uji F, uji T, dan uji R^2 .

3.6.1 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0, \text{ artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau:}$$

$H_a : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$ artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

Uji t dalam penelitian ini menggunakan *software SPSS IBM V.20.0 for windows*, kemudian pengujian membandingkan antara nilai signifikansi t pada tabel *One-Sample Test* dengan tingkat signifikansi ($\alpha = 5\%$).

Hipotesis uji t

- a. Uji t dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$T_{hitung} = \frac{\text{koefisien regresi}}{\text{Standar error koefisien regresi}}$$

- b. Kaidah keputusan yang diambil yaitu :

Signifikan $t > \alpha = 0,05$ berarti H_0 di terima artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Signifikan $t < \alpha = 0,05$ berarti H_0 di Tolak artinya secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen..

3.6.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien R^2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien R^2 adalah diantara nol dan satu. Jika nilai *Rsquare* berkisar hampir satu, berarti semakin kuat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dan sebaliknya jika nilai *R square* semakin mendekati angka nol, berarti semakin

lemah kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen
(Ghozali, 2013)

$$\text{Rumus } R^2: R^2 = \frac{SSR}{SST}$$

Keterangan:

R^2 = Besarnya Koefisien Determinasi

SSR = Sum Of Square Regression

SST = Sum Of Square Total.



BAB IV**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Salah satu Penerimaan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Rachim (2015), penerimaan daerah adalah keseluruhan uang yang masuk ke kas daerah, pengertian ini harus dibedakan dengan pengertian pendapatan asli daerah karena tidak semua penerimaan daerah merupakan pendapatan asli daerah. Dalam hal ini, pendapatan asli daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. PAD merupakan salah satu indikator dari kemandirian otonomi daerah dalam menggali potensi untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan. Semakin besar PAD, maka semakin mandiri daerah dalam mengambil keputusan dan kebijakan pembangunan (Sari, 2013). Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu pada pasal 79 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah (Abdullah, 2013). Dengan semakin banyaknya sumber-sumber PAD yang dimiliki, maka sumber pendapatan daerah akan semakin banyak sehingga dapat diwujudkan dengan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Sejak Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 1 tentang penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia diberlakukan. Penyelenggaraan pemerintah daerah oleh PEMDA dan DPRD menganut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Pemerintah pusat tidak lagi mengatur, mendominasi pemerintah dan masyarakat daerah. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

Terdapat beberapa alasan mengapa pariwisata perlu untuk dikembangkan terutama bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia. Pertama, adanya motivasi seseorang untuk berwisata merupakan peluang bagi suatu wilayah dengan potensi wisata untuk menjadi media pemenuhan kebutuhan. Kedua, dengan menjadi media pemenuhan kebutuhan tersebut, maka ada berbagai keuntungan yang dapat diraih. Ketiga, bagi negara sedang berkembang, industri pariwisata merupakan media pembangunan ekonomi yang tidak memerlukan investasi besar dalam jangka panjang. Keempat, sektor pariwisata dapat mengurangi ketergantungan impor karena barang modal dan barang habis pakai dapat disediakan oleh destinasi pariwisata. Kelima, peran pariwisata yang sangat besar dalam perekonomian dunia memberi peluang yang lebih besar bagi Indonesia untuk menarik segmen pasar dari negara-negara maju. Keenam, industri pariwisata dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Menurut Nasrul (2010) dalam Purwanti dan Dewi (2014) mengatakan bahwa majunya sektor pariwisata di suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang berkunjung, hal ini dikarenakan kedatangan wisatawan tersebut akan mendatangkan penerimaan bagi daerah yang dikunjungi. Wisatawan tersebut bisa berasal dari wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara. Bagi wisatawan mancanegara yang datang dari luar negeri, maka kedatangan mereka akan mendatangkan devisa dalam Negara. Maka semakin banyak wisatawan yang

berkunjung maka akan memberi dampak yang positif bagi Daerah Tujuan Wisata (DTW) terutama terhadap sumber pendapatan daerah.

Fasilitas yang ada pada daerah wisata menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk mempengaruhi peningkatan wisatawan yang datang untuk berwisata. Semakin lengkap dan nyaman fasilitas yang tersedia di daerah wisata tersebut maka akan menarik wisatawan untuk datang karena mereka merasa apa yang mereka butuhkan saat melakukan perjalanan wisatanya menjadi lebih nyaman dan tenang. Fasilitas tersebut dapat berupa jumlah penginapan dan jumlah restoran dan rumah makan yang tersedia di daerah tersebut. Kedua fasilitas tersebut nantinya akan memberikan dampak yang positif kepada pajak daerah yang nantinya akan meningkatkan pendapatan daerah.

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Analisis Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai variabel – variabel penelitian seperti pengaruh variabel jumlah pajak restoran, jumlah pajak hotel, dan restribusi secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur. Statistik deskriptif untuk variabel – variabel tersebut dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Restoran	38	1376.180	509273.170	22475.91263	82621.152585
Hotel	38	79.720	273584.380	11399.16237	44510.286388
Retribusi	38	20.000	97222.730	3969.28789	16036.753567
PAD	38	561.250	5381920.250	512022.56763	861708.077141
Valid N (listwise)	38				

Sumber data Primer diolah peneliti 2021

Berdasarkan tabel 4.1 disajikan statistik deskriptif variabel penelitian meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata – rata (*mean*) dan standar deviasi.

Untuk variabel jumlah pajak restoran didapatkan rata – rata variabel (*mean*) sebesar 22475. dan juga standar deviasi sebesar 82621. Dari hasil ini juga didapat nilai *maximum* sebesar 509273 dan nilai *minimum* sebesar 1376.

Pada variabel Jumlah pajak hotel diperoleh nilai rata – rata variabel (*mean*) sebesar 11399 dan nilai standar deviasi sebesar 44510. Dari hasil uji ini diperoleh juga nilai *maximum* sebesar 273584 dan nilai *minimum* sebesar 79.

Pada variabel Jumlah Retribusi diperoleh nilai rata – rata variabel (*mean*) sebesar 3969 dan nilai standar deviasi sebesar 16036. Dari hasil uji ini diperoleh juga nilai *maximum* sebesar 97222 dan nilai *minimum* sebesar 20.

Pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh nilai rata – rata variabel (*mean*) sebesar 512022 dan nilai standar deviasi sebesar 861708. Dari hasil uji ini diperoleh juga nilai *maximum* sebesar 5381920 dan nilai *minimum* sebesar 561.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas data

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data hasil penelitian mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji *Kolmogrov – Smirnov*. Bila probabilitas hasil uji *Kolmogrov – Smirnov* lebih besar dari 0,05 ($>0,05$) maka data penelitian akan berdistribusi normal dan apabila sebaliknya maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas Data

		RM	Hotel	Retribusi	PAD
N		38	38	38	38
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	22475.91263	11399.16237	3969.28789	512022.56763
	Std. Deviation	82621.152585	44510.286388	16036.753567	861708.077141
Most Extreme Differences	Absolute	.411	.400	.406	.349
	Positive	.411	.395	.406	.349
	Negative	-.399	-.400	-.403	-.316
Test Statistic		.551	1.100	1.106	.949
Asymp. Sig. (2-tailed)		.992 ^c	.176 ^c	.129 ^c	.421 ^c

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian normalitas data pada tabel 4.3 maka diketahui :

Variabel jumlah restoran memiliki nilai *Kolmogrov – Smirnov* dari hasil uji normalitas data sebesar 0,551 dengan nilai *Asymp. Sig* sebesar 0.992. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas $> \text{level of signifikan}$ ($\alpha=5\%$) sehingga bisa dinyatakan berdistribusi normal.

Variabel Jumlah Hotel memiliki nilai *Kolmogrov – Smirnov* dari hasil uji normalitas data sebesar 1,110 dengan nilai *Asymp. Sig* sebesar 0.176. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas $> \text{level of signifikan}$ ($\alpha=5\%$) sehingga bisa dinyatakan berdistribusi normal.

Variabel Jumlah Retribusi memiliki nilai *Kolmogrov – Smirnov* dari hasil uji normalitas data sebesar 1,106 dengan nilai *Asymp. Sig* sebesar 0.129. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas $> \text{level of signifikan}$ ($\alpha=5\%$) sehingga bisa dinyatakan berdistribusi normal.

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai *Kolmogrov – Smirnov* dari hasil uji normalitas data sebesar 0,949 dengan nilai *Asymp. Sig* sebesar 0.421. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas $> \text{level of signifikan}$ ($\alpha=5\%$) sehingga bisa dinyatakan berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dengan cara menganalisis matriks korelasi variabel – variabel independen yang dapat di lihat melalui Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF yang bisa ditoleransi adalah 10 atau nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 maka model dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Asumsi Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
RM	.062	7.727
Hotel	.066	6.250
Retribusi	.065	1.785

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2021

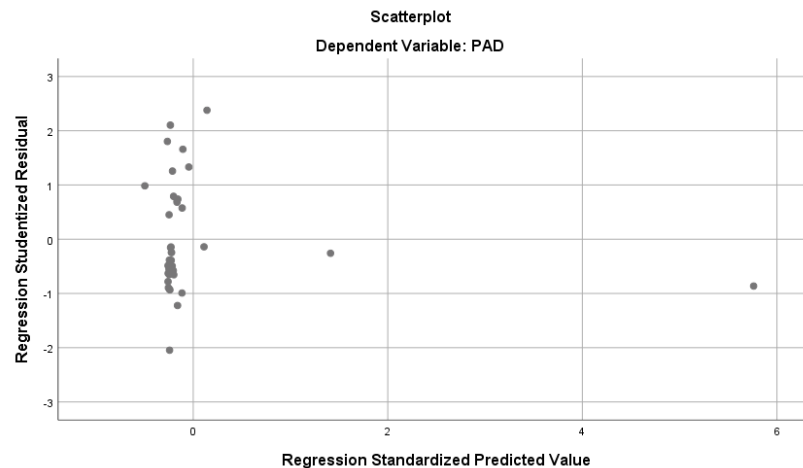
Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Tolerance lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95% (Tingkat Ketelitian). Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan nilai VIF kurang dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi di penelitian ini.

c. Uji Heterokedastisitas

Dalam uji heterokedastisitas ini menggunakan *scatter plot* yang merupakan sebuah grafik yang diplot poin atau titik yang menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan residunya. Dasar membentuk pola tertentu atau teratur maka mengidentifikasi telah terjadi heterokedastisitas. Sebaliknya

apabila titik-titik yang ada menyebar diatas dan dibawah angka 0 sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Gambar 4.1 Grafik Scater Plot



Hasil analisis pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan dalam penyebarannya tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas pada model yang diuji, sehingga asumsi ini terpenuhi.

4.3.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan *Software SPSS IBM V.20 for Windows* didapatkan ringkasan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1. (Constant)	274292.767	28017.792			9.790	.000
RM	19.638	7.545	1.883	2.603	.014	
Hotel	-20.972	6.987	-1.083	-3.002	.005	
Retribusi	8.919	22.038	.166	.405	.688	

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data Sekunder diolah 2021

$$PAD = 274292 + 19,638RM - 20,972Hotel + 8,919 \text{ Retribusi} + e$$

Berdasarkan pada tabel 4.4 didapatkan hasil sebagai berikut persamaan regresi yang terbentuk adalah :

1. Koefisien variable jumlah pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 19.638. Koefisien variable jumlah pajak restoran adalah positif, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan *jumlah pajak restoran* sebesar 1 satuan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 19.638.
2. Koefisien variable jumlah pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -20.972. Koefisien variable jumlah pajak hotel adalah negatif, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan jumlah pajak hotel sebesar 1 satuan akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -20.972.
3. Koefisien variable Pajak Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8.919. Koefisien variable Pajak Retribusi adalah positif, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Pajak Retribusi sebesar 1 satuan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8.919.

4.3.3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis terdiri dari uji F, uji R^2 , dan Uji t. Masing-masing hasil pengujian dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yaitu Profitabilitas dan Solvabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama – sama (simultan) terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F, dengan cara membandingkan nilai F_{hitung} hasil analisis regresi dengan nilai signifikansi F pada taraf nyata $\alpha = 0.05$.

Tabel 4.5
Hasil Uji Hipotesis F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	26695338160109.863	3	8898446053369.955	388.543	.000 ^b
Residual	778671817671.979	34	22902112284.470		
Total	27474009977781.844	37			

Sumber : Data Sekunder diolah 2021

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.5, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 388,543 dengan nilai signifikan F sebesar $0.000 < \alpha (0.05)$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, maka variabel jumlah pajak restoran, jumlah pajak hotel dan pajak retribusi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur.

2. Uji Determinasi R^2

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependen (Y), sedangkan sisanya dijelaskan oleh variable lain diluar model.

Tabel 4.6
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.986 ^a	.972	.969	151334.438528

Sumber : Data Sekunder diolah 2021

Berdasarkan hasil dapat diketahui nilai R Square sebesar 0,972 atau 97,2%. Artinya kontribusi terhadap variable Y dijelaskan sebesar 97,2% oleh variable jumlah wisatawan, jumlah restoran/ rumah makan, dan jumlah penginapan. Sedangkan kontribusi pengaruh terhadap variable Y lainnya sebesar 2,8% dijelaskan oleh variable lain atau variable independen diluar persamaan regresi.

3. Uji Parsial (Uji t-Statistik)

Uji parsial atau uji t-statistik digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara parsial atau pengaruh tiap-tiap variable independen terhadap variable dependen dengan melihat nilai probabilitasnya. Dalam penelitian ini uji t-statistik digunakan untuk melihat pengaruh variable jumlah pajak restoran, jumlah pajak hotel, dan Retribusi terhadap variable Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa dari variable independen yang mempengaruhi variable dependen, dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4.7
Hasil Uji Hipotesis t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	274292.767	28017.792			9.790	.000
Restoran	19.638	7.545	1.883	2.603	.014	
Hotel	-20.972	6.987	-1.083	-3.002	.005	
Retribusi	8.919	22.038	.166	.405	.688	

a. Dependent Variable: PAD

a. Variabel Jumlah Pajak Restoran

Berdasarkan hasil uji t-statistik menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada variable Jumlah Pajak Restoran sebesar 0,014. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05 atau dengan kata lain berpengaruh signifikan pada tingkat 5%. Dengan demikian maka dapat

disimpulkan bahwa variable Jumlah Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap variable Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur.

b. Variabel Jumlah Pajak Hotel

Berdasarkan hasil uji t-statistik menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada variable Jumlah Pajak Hotel sebesar 0,005. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05 atau dengan kata lain berpengaruh signifikan pada tingkat 5%. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa variable Jumlah Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap variable Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur.

c. Variable Jumlah Pajak Retribusi

Berdasarkan hasil uji t-statistik menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada variable retribusi sebesar 0,688. Nilai tersebut lebih besar dari nilai alpha sebesar 0,05 atau dengan kata lain tidak berpengaruh signifikan pada tingkat 5%. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa variable retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap variable Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur.

4.4. Interpretasi Hasil Analisis

4.4.1. Pengaruh Jumlah Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variable Jumlah pajak Restoran berpengaruh nyata terhadap variable Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur.

Aliran pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah akan mempengaruhi pendapatan kepada pihak

pemerintah dan merupakan sumber pendapatan yang utama. Hal ini berarti kontribusi dari pajak restoran dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya PAD (Sukirno, 2002).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sigit Sanjaya (2020) yang menemukan bahwa penerimaan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Sumatra Barat.

4.4.2. Pengaruh Jumlah Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variable Jumlah Pajak Hotel berpengaruh nyata terhadap variable Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur.

Pembayaran pajak oleh orang pribadi dan perusahaan kepada pemerintah akan mempengaruhi pendapatan kepada pihak pemerintah dan merupakan sumber pendapatan utama. Hal ini berarti kontribusi dari pajak hotel dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadli Lidya Rikayana dan Nurhasanah (2020) yang menemukan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

4.4.3. Pengaruh Jumlah Pajak Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variable Jumlah Pajak Retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap variable Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur.

Pendapatan obyek pariwisata merupakan penerimaan obyek pariwisata yang berasal dari retribusi karcis masuk, retribusi parkir, dan pendapatan lain-lain yang sah berasal dari obyek pariwisata tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pada pasal 6 dapat diketahui bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah menjelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pada Pasal 18 ayat (2) telah menjelaskan tentang penggolongan retribusi berdasarkan objeknya, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dalam hal ini retribusi tidak berpengaruh terhadap PAD, hal ini bisa jadi dikarenakan kurang meratanya beberapa objek wisata dan kunjungan pada Kota atau Kabupaten di Jawa Timur. Hal ini menyebabkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kurang merata.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Jumlah Pajak Restoran berpengaruh nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur. Pajak restoran merupakan sumber pendapatan yang utama bagi Pendapatan asli daerah (PAD). Kenaikan Jumlah Pajak Restoran akan menyebabkan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur.
2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Jumlah Pajak Hotel berpengaruh nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur. Pembayaran pajak oleh hotel kepada pemerintah akan memperngaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenaikan Jumlah Pajak Hotel akan menyebabkan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur.
3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Jumlah Pajak Retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur. Kurang meratanya beberapa objek wisata dan kunjungan pada Kota atau Kabupaten menyebabkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kurang merata.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pihak restoran sebaiknya lebih memperhatikan kualitas pelayanan restoran, kebersihan restoran, dan menu-menu yang disajikan, agar para pengunjung yang datang lebih nyaman dan senang mengunjungi restoran ketika melakukan kunjungan ke objek wisata.
2. Pihak hotel sebaiknya lebih meningkatkan pelayanan hotel, kebersihan hotel, serta tarif hotel yang lebih terjangkau agar wisatawan dari berbagai lapisan masyarakat dapat menginap dengan nyaman di hotel sekitar objek wisata.
3. Pemerintah sebaiknya berkonsentrasi untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Restribusi daerah diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah kota atau kabupaten untuk lebih memaksimalkan fasilitas, dan perbaikan sarana wisata guna meningkatkan pendapatan dari Retribusi karena dengan peningkatan retribusi daerah akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pemerintah akan semakin mudah membiayai kegiatan-kegiatan dan keperluan daerah yang nantinya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan peningkatan fasilitas-fasilitas bagi masyarakat Provinsi Jawa Timur. Retribusi daerah sebaiknya dapat disalurkan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghifari, Abdurrahman H. (2018). *Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat (Tahun 2013-2016)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Arsyad, Azhar. (2016). *Media Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Austriana, Ida. (2005). Analisis Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Jawa Tengah. *Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Seri 2020 Distribusi PDB Triwulan Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (Persen), 2018*. Retrieved September 20, 2020 from <https://bps.go.id/indicator/11/106/3/-seri-2010-distribusi-pdb-triwulan-2010-atas-dasar-harga-berlaku.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)*. Retrieved September 20, 2020 from <https://jombangkab.bps.go.id/statictable/2020/03/05/5461/distribusi-persentase-pdrb-seri-2010-menurut-lapangan-usaha-persen-2010---2019.html>.
- Ghozali, Imam. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kuncoro, Mudrajat. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Penerbit Erlangga.
- Lanza, Brau dan Pigliaru, F. (1995). How Facts are The Tourism Countries Growing? The Cross-Country Evidence. *Crenos Centro Ricerche Economiche Nord Sud, Working Paper No.03-09*.
- Ninemeier, Jack D. & Hayes, David K. (2011). *Restaurant Operations Management*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Nizar, Muhammad Afdi. (2011). *Pengaruh Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Tourism Effect on Economic Growth in Indonesia)*.
- Pemerintah Indonesia *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 130. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. *Undang Undang tentang Kepariwisataaan, UU No. 10 Tahun 2009*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 11. Sekretariat Negara. Jakarta.

Purwanti, N.D., dan Dewi, R.M. 2014. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2006-2013, *Jurnal ilmiah Program Studi Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Surabaya*.

Siahaan, Marihot Pahala. (2010). *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media, Cetakan Pertama.

Spillane, James. (1987). *Pariwisata Indonesia Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.

Spillane, James. (1994). *Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Suarthana. (2006) *Manajemen Perhotelan edisi Kantor Depan*. Kuta Utara: Mapindo.

Sukirno, Sadono. 2002. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Zulmi, Faisal. (2018). *Peranan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

LAMPIRAN

Tabulasi Data

No.	Nama Kota/Kab.	Tahun	Pajak Restoran	Pajak Hotel	Restribusi	PAD
1	Kab. Bangkalan	2019	2,360,353,000	80,000,000	150,000,000	262,258,214,631
2	Kab. Banyuwangi	2019	24,597,749,800	18,433,145,000	4,971,073,000	495,691,172,682
3	Kab. Blitar	2019	2,472,912,140	79,720,000	128,901,000	285,742,715,699
4	Kab. Bojonegoro	2019	5,979,852,095	4,314,460,102	477,972,057	561,251,499,96
5	Kab. Bondowoso	2019	2,289,512,060	916,041,943	72,927,400	218,538,009,619
6	Kab. Gresik	2019	20,000,000,000	4,000,000,000	5,500,000,000	980,776,381,995
7	Kab. Jember	2019	12,500,000,000	5,325,000,000	1,500,000,000	667,598,426,910
8	Kab. Jombang	2019	5,595,000,000	605,000,000	25,000,000	476,662,933,476
9	Kab. Kediri	2019	3,930,000,000	561,000,000	65,000,000	457,763,422,282
10	Kab. Lamongan	2019	7,015,000,000	2,419,500,000	1,000,000,000	472,002,823,164
11	Kab. Lumajang	2019	3,625,000,000	1,400,000,000	200,000,000	296,467,374,174
12	Kab. Madiun	2019	2,228,446,000	96,090,000	84,290,000	229,206,394,170
13	Kab. Magetan	2019	2,000,000,000	400,000,000	100,000,000	237,377,706,042
14	Kab. Malang	2019	4,743,750,000	3,080,000,000	1,045,000,000	623,808,877,785
15	Kab. Mojokerto	2019	4,500,000,000	3,720,000,000	200,000,000	554,999,510,279
16	Kab. Nganjuk	2019	1,411,200,000	134,100,000	213,600,000	368,272,236,478
17	Kab. Ngawi	2019	2,981,774,100	213,068,900	25,328,700	255,080,331,089
18	Kab. Pacitan	2019	1,475,000,000	515,000,000	48,546,584	199,044,387,518
19	Kab. Pamekasan	2019	1,376,175,000	482,689,500	107,550,000	219,671,437,717
20	Kab. Pasuruan	2019	19,000,000,000	8,500,000,000	500,000,000	650,889,114,689
21	Kab. Ponorogo	2019	2,975,000,000	975,000,000	200,000,000	290,815,307,168
22	Kab. Probolinggo	2019	4,000,000,000	500,000,000	40,000,000	245,431,703,862
23	Kab. Sampang	2019	2,000,000,000	270,000,000	25,000,000	168,778,440,667
24	Kab. Sidoarjo	2019	78,500,000,000	15,000,000,000	23,500,000,000	1,689,953,213,263
25	Kab. Situbondo	2019	2,165,844,200	710,631,395	25,850,000	204,727,875,621
26	Kab. Sumenep	2019	1,779,082,150	302,000,000	97,800,251	246,421,640,623
27	Kab. Trenggalek	2019	2,695,000,000	283,000,000	20,000,000	285,134,071,596
28	Kab. Tuban	2019	4,609,000,000	1,737,700,000	260,000,000	518,003,562,562
29	Kab. Tulungagung	2019	8,292,576,678	3,000,000,000	359,351,160	486,358,101,284
30	Kota Blitar	2019	2,295,000,000	875,000,000	245,000,000	166,140,178,782
31	Kota Kediri	2019	10,919,000,000	4,120,000,000	1,300,000,000	266,745,042,378



32	Kota Madiun	2019	8,500,000,000	5,515,000,000	1,400,000,000	252,048,754,414
33	Kota Malang	2019	62,750,000,000	45,600,000,000	6,250,000,000	588,066,042,351
34	Kota Mojokerto	2019	5,600,000,000	815,000,000	850,000,000	192,695,566,220
45	Kota Pasuruan	2019	1,494,288,000	419,796,000	32,016,000	161,712,573,176
36	Kota Probolinggo	2019	2,455,000,000	1,503,724,113	140,000,000	175,775,285,716
37	Kota Surabaya	2019	509,273,166,589	273,584,379,199	97,222,734,081	5,381,920,253,810

